

**Analisis prioritas kebijakan subsektor pertanian di Kabupaten Malang,
Jawa Timur**
**Analysis of agricultural subsector policy priorities in Malang Regency
East Java**

Muhammad Fajar Maulana^{1a}, Yohanes Wilfrid Leki²

¹Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145

²Pascasarjana Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145

^aKorespondensi : Muhammad Fajar Maulana, E-mail: muhammadfajar@student.ub.ac.id

Diterima: 28 – 11 – 2022 , Disetujui: 04 – 01 – 2023

ABSTRACT

The development of the agricultural sector is aimed at increasing the welfare of farmers by increasing food security and agricultural competitiveness. One of the main goals of agricultural development is to improve the life of farmers and their families for a better and more prosperous life. The welfare of farmers is the impact of achieving the outcomes of agricultural development programs/policies, where the conditions to be achieved in maintaining national food security are stable food supply, easy and cheap access to food and smooth distribution of food. Therefore, food policy is directed at *food availability* and community *food access* which is one of the pillars of food security which is directed at regulating the stability and continuity of food supply. The PROMETHEE method is drawing orders or priorities. With proper consideration, this method can be a tool for determining policy priorities for stakeholders. The purpose of this research is to analyze the priority of agricultural sub-sector policies in Malang Regency. The data analysis method used is PROMETHEE with the respondents being stakeholders/experts. The results showed that food and horticulture criteria with policies to increase *food availability* and community *food access* ($\Phi = 0.625$) were preferred and ranked at the top.

Keywords: Agricultural sub-sector policies, Food security, PROMETHEE

ABSTRAK

Pembangunan sektor pertanian memiliki proyeksi dimana untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui aspek ketahanan pangan dan keunggulan daya saing pertanian. Oleh karena itu, diantara beberapa tujuan utama pembangunan pertanian yakni menjamin kesejahteraan kehidupan petani dan keluarganya. Hal-ini-merupakan-sasaran sekaligus implikasi dari tercapainya-indikator program maupun kebijakan yang diaktualisasikan, dimana kondisi yang ingin-dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan-nasional-adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan-mudah dan terjangkau serta-distribusi pangan-merata. Sehingga kebijakan-pangan diarahkan-pada ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses-pangan masyarakat (*food acces*) yang merupakan-salah satu pilar-dari ketahanan pangan serta diarahkan untuk mengatur-kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan. Metode PROMETHEE-merupakan satu-metode penentuan-urutan atau prioritas dalam analisis-multikriteria yang berguna-dalam proses pengambilan keputusan. Berbasis entropi dan topsis yang didasarkan fungsi *preferensi*, metode ini bisa menjadi rekomendasi sekaligus evaluasi untuk menentukan prioritas kebijakan bagi *stakeholder*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prioritas kebijakan subsektor pertanian di Kab. Malang. Metode analisis data yang digunakan adalah PROMETHEE dengan responden yakni *stakeholder* maupun *expertise*. Hasilpenelitian menunjukkan kriteria pangan dan holtikultura dengan kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*) ($\Phi = 0,625$) lebih disukai dan berada pada rank terbatas.

Kata kunci: Kebijakan subsektor pertanian, Ketahanan Pangan, PROMETHEE

Maulana, M.F.,Leki,Y.W. (2023). Analisis Prioritas Kebijakan Subsektor Pertanian Di Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Green House*, 1(2), 27 – 37 .

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan urgensi dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi (Rangelova et al. 2017). Peranan pertanian sangat strategis dan potensial khususnya dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing serta penyerapan tenaga kerja dimana sektor pertanian mampu menyerap 40% dari total tenaga kerja dalam satu dekade terakhir sehingga menjadikan pertanian sebagai sektor vital untuk menjamin mata pencaharian. Disisi lain, mampu untuk mendorong pertumbuhan agroindustri dan akselerasi ekspor komoditas pertanian untuk peningkatan volume ekspor dan devisa negara secara agregat, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat hingga 5,7 - 6,0% per tahun (Moeis et al. 2020). Menurut (Middendorf et al. 2021) guncangan seperti COVID-19 akan menyebabkan gangguan pada sisi permintaan disemua sektor serta industri karena hilangnya pendapatan dari pekerja, pengurangan aktivitas pariwisata dan restoran, serta sisi penawaran karena masalah terkait produksi seperti gangguan pasokan input, ketersediaan tenaga kerja, kehilangan makanan dan pemborosan makanan karena kurangnya fasilitas penyimpanan dan pergeseran transportasi yang lambat. Akan tetapi, pada sektor pertanian justru mampu mengalami peningkatan aktivitas dan produktivitas pertanian yang menyebabkan surplus sebesar 16,24% terhadap pertumbuhan PDB selama masa pandemi COVID-19, sehingga sektor pertanian merupakan penyelamat atas resesi selama masa pandemi.

Secara umum, terdapat lima subsektor yang menopang pertanian, yaitu subsektor pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan, perikanan, dan peternakan. Dimana subsektor pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting dan strategis bagi kehidupan manusia, karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hajat setiap masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Indonesia adalah menyangkut pertumbuhan penduduk, terbatasnya sumber daya alam, terbatasnya sarana dan prasarana usaha bidang pangan, ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin, yang paling krusial adalah semakin sempitnya lahan pertanian atau alih fungsi lahan (Yamin 2019). Dimana ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*) merupakan salah satu pilar dari ketahanan pangan yang diarahkan untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan demi menyokong kecukupan pangan setiap penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pangan kedepannya harus mempertimbangkan keterkaitan antara dua sektor utama, yaitu sektor pertanian dan sektor kesehatan dalam upaya implementasi dan revitalisasi pangan nasional. Dalam hal ini khususnya pemerintah berupaya untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Pemerintah di seluruh dunia berusaha mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatasi kerawanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, dimana salah satunya adalah dengan peningkatan produksi pangan pokok menjadi prioritas nasional (Soko, Kaitibie, and Ratna 2023). Terdapat beberapa dasar utama pentingnya kebijakan pertanian antara lain (1) tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian relatif besar, terutama di negara berkembang, (2) sektor pertanian merupakan penyumbang devisa negara

terbesar, lebih besar dari sektor pengolahan (industri), (3) transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian masih terasa sulit. Oleh karena itu, pengabaian sektor pertanian akan menyebabkan struktur perekonomian berubah. Tujuan kebijakan pertanian mendasar tidak hanya meningkatkan produksi, akan tetapi hal yang lebih utama adalah pembangunan manusia, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Meningkatkan pendapatan keluarga petani merupakan hal mendasar untuk mencapai tujuan tersebut, dan pada gilirannya menekankan pada peningkatan produktivitas dan memberikan harga pada tingkat petani yang tepat.

Dalam jangka panjang, ruang lingkup kebijakan pertanian diarahkan pada pertumbuhan pertanian. Hal ini merupakan yang perlu dikoreksi dari waktu ke waktu. Kebijakan perlu diarahkan pada unsur-unsur ekonomi makro seperti kebijakan rasio harga output dan input, kebijakan pada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia termasuk sumberdaya bersama dan sumberdaya publik seperti irigasi, kebijakan untuk mendapatkan akses input, pasar output, dan teknologi pertanian. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam jangka mengarah pada kemandirian pelaku usaha (produsen) dalam menjalankan fungsi produksinya. Tentu kondisi ini mengarah pada pasar yang lebih kompetitif yang akan memberikan hak yang lebih besar bagi konsumen (Aziza 2014). Tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kab. Malang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan ketahanan pangan semakin berat. Hal ini karena kondisi Kab. Malang yang semakin kompleks dan bervariasi. Menurunnya lahan pertanian yang berpengaruh terhadap orientasi pembangunan ke arah *off farm*, dan masih terbatasnya sarana-prasarana teknologi pertanian semakin membawa dinas (institusi) harus lebih berperan aktif dalam pembangunan pertanian dan mengembangkan potensi daerah. Meskipun demikian, pembangunan pertanian masih mempunyai peluang yang terbuka lebar untuk dimanfaatkan. *Trend* konsumsi masyarakat terhadap tanaman obat, meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat terhadap komoditi pertanian, minat masyarakat terhadap tanaman hias dan ikan hias yang semakin meningkat, meningkatnya produktivitas padi dan sayur-sayuran serta meningkatnya pendidikan para petani, dan didukung oleh meningkatnya kualitas dan produktivitas teknis dinas juga dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang diselenggarakan dan kolaboratif dengan seluruh *stakeholder* terkait.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2021 di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yakni *purposive sampling* dimana jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 13 responden yang meliputi yakni Kepala dan Staff Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Penyuluh, Kelompok Tani Sido Makmur serta Sub Kelompok Nelayan "Guyub Rukun Abadi". *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (*key informan*) yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif (Sugiyono 2014).

Kriteria yang dijadikan sebagai sampel yakni *stakeholder* atau *expertise* (pakar) yang berkaitan dan relevan terhadap implementasi strategi maupun kebijakan subsektor pertanian di Kab. Malang. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuisioner dan

wawancara terstruktur. Alat analisis yang digunakan adalah software *Visual PROMETHEE Academic* 1.4. for Windows, dimana dapat mengunduh pada situs resmi yakni <http://www.promethee-gaia.net>. Adapun strategi maupun kebijakan subsektor pertanian yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel 1 yakni sebagai berikut.

Tabel 1. Kebijakan subsektor pertanian

Scenario	Kebijakan	Kode	Skala
Subsektor Pertanian (Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Kehutanan, Perikanan, Peternakan)	Pengelolaan sistem pengawasan	x_1	Ordinal
	Peningkatan daya beli masyarakat baik komoditas pangan maupun non pangan melalui stabilitas harga	x_2	
	Peningkatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan para stakeholder termasuk SKPD terkait	x_3	
	Optimalisasi peran penyuluh dan kelembagaan masyarakat	x_4	
	Meningkatkan ketersediaan pangan (<i>food availability</i>) dan akses pangan masyarakat (<i>food acces</i>)	x_5	
	Mengembangkan sarana dan prasarana serta diversifikasi produk pertanian, perikanan dan peternakan	x_6	

(Sumber: data primer, 2022)

PROMETHEE adalah singkatan dari *Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations* yang merupakan salah satu dari metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) yang pada prinsipnya adalah melakukan penentuan atau pengurutan dalam suatu analisis multikriteria, metode ini dikenal karena konsepnya yang efisien dan mudah, sehingga banyak diaplikasikan khususnya didalam identifikasi dan evaluasi kebijakan maupun keputusan dari yang terbaik hingga terburuk (Florida, López, and Pocomucha 2012).

Secara matematis, urutan peringkat pada metode PROMETHEE didasarkan pada besarnya nilai aliran keluar (*leaving flow*) dan aliran masuk (*entering flow*) sehingga didapatkan nilai untuk netflow (Φ) Adapun Nilai Net flow didapatkan berdasarkan persamaan yakni sebagai berikut (Zuraidah 2019).

$$\phi(a) = \phi^+(a) - \phi^-(a) \quad (1)$$

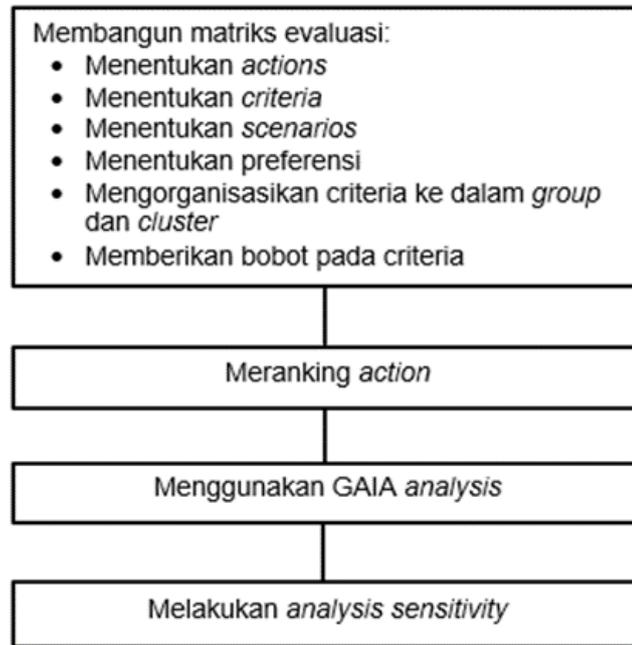
Keterangan:

$\phi^+(a)$ = persamaan rumus *positive flow* (PROMETHEE I)

$\phi^-(a)$ = persamaan rumus *negative flow* (PROMETHEE I)

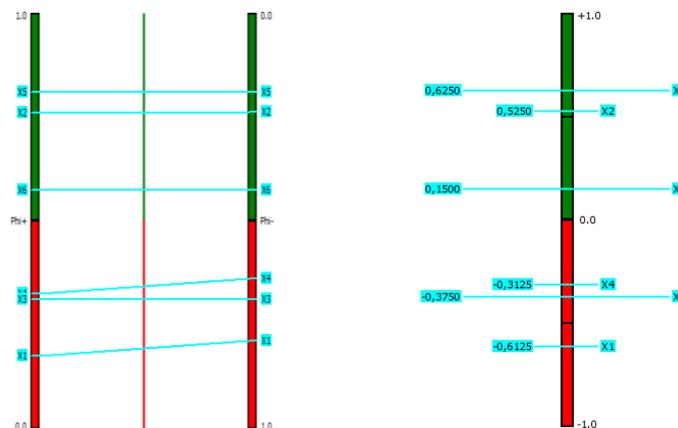
$\phi(a)$ = persamaan rumus *net flow* (PROMETHEE II)

Outputnya yakni dapat dijadikan metode untuk pengambilan prioritas keputusan dengan pemilihan berbagai alternatif skenario kebijakan. Adapun proses dalam analisis PROMETHEE menggunakan software *Visual PROMETHEE Academic* 1.4. for Windows dapat dilihat pada Gambar 1 yakni sebagai berikut.



Gambar 1. Alur proses analisis PROMETHEE

HASIL DAN PEMBAHASAN PROMETHEE I Partial Ranking dan II Complete Ranking

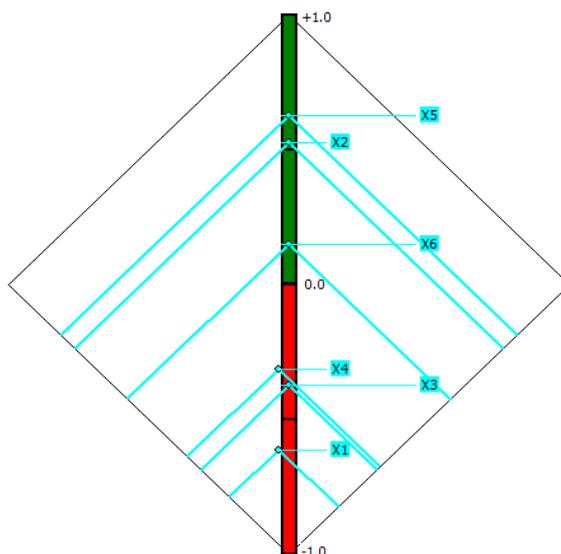


Gambar 2. Result output PROMETHEE I Partial Ranking dan II Complete Ranking

Berdasarkan gambar 2 yakni Result output PROMETHEE I atau Partial Ranking menunjukkan bahwa kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*) lebih disukai dari semua kebijakan subsektor pertanian lainnya. Sedangkan pada PROMETHEE II dapat disimpulkan bahwa kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*) menunjukkan pada peringkat terbaik yakni memiliki skor Phi dengan nilai positif sebesar 0,625 yang ditunjukkan dengan skala warna hijau. Kebijakan peningkatan daya beli masyarakat baik komoditas pangan maupun non pangan melalui stabilitas harga ditunjukkan dengan skala warna hijau yang memiliki skor Phi dengan nilai positif sebesar

0,525 kemudian diikuti dengan kebijakan mengembangkan sarana dan prasarana serta diversifikasi produk pertanian, perikanan dan peternakan yang memiliki skor Phi dengan nilai positif sebesar 0,150. Selanjutnya kebijakan pengelolaan sistem pengawasan berada pada peringkat terbawah dengan skor -0,612 yang ditunjukkan dengan skala warna merah (negatif).

PROMETHEE Diamond



Gambar 3. Result output PROMETHEE Diamond

Berdasarkan gambar 3, dapat disimpulkan pada Result output PROMETHEE Diamond menunjukkan bahwa kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*) lebih disukai dari pada semua kebijakan subsektor pertanian lainnya. Dimana untuk setiap kebijakan, sebuah kerucut ditarik dari posisi aksi di bidang. Sehingga kerucut saling tumpang tindih dengan semua kerucut lainnya hal ini sesuai dengan preferensi, tindakan ini lebih disukai daripada semua kerucut lainnya di peringkat parsial PROMETHEE I. Sebaliknya ketika dua kerucut berpotongan satu sama lain, ada ketidakterbandingan dalam Peringkat Parsial PROMETHEE II.

PROMETHEE Table

Tabel 2. Result output PROMETHEE Table

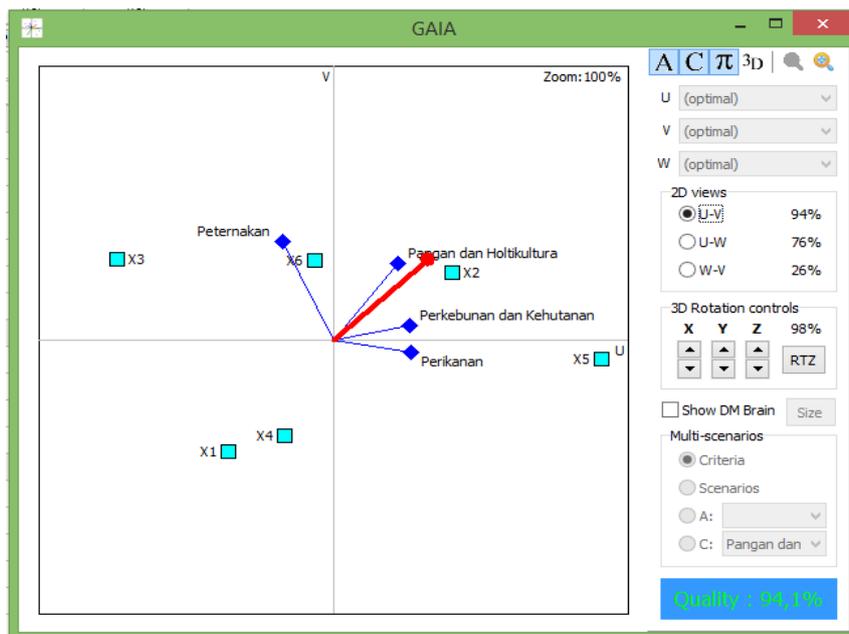
Rank	Kebijakan	Phi	Phi ⁺	Phi ⁻
1	Meningkatkan ketersediaan pangan (<i>food availability</i>) dan akses pangan masyarakat (<i>food acces</i>)	0,625	0,812	0,187
2	Peningkatan daya beli masyarakat baik komoditas pangan maupun non pangan melalui stabilitas harga	0,525	0,762	0,237
3	Mengembangkan sarana dan prasarana serta diversifikasi produk pertanian, perikanan dan peternakan	0,150	0,575	0,425
4	Optimalisasi peran penyuluh dan kelembagaan masyarakat	-0,312	0,325	0,637

5	Peningkatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan para stakeholder termasuk SKPD terkait	-0,375	0,312	0,687
6	Pengelolaan sistem pengawasan	-0,612	0,175	0,787

(Sumber: data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan pada Result output PROMETHEE Table menunjukkan bahwa kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*) berada pada rank 1 yakni paling atas dengan nilai Phi sebesar 0,625, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi secara positif terhadap skor net flow dan implikasinya adalah memberi keuntungan nyata sekaligus menjadi prioritas terhadap kebijakan subsektor pertanian. Kemudian kebijakan pengelolaan sistem pengawasan berada pada rank terbawah dengan nilai Phi sbesar -0,612, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi secara negatif terhadap skor net flow dan implikasinya adalah memberi kelemahan nyata terhadap kebijakan subsektor pertanian.

GAIA Visual Analysis

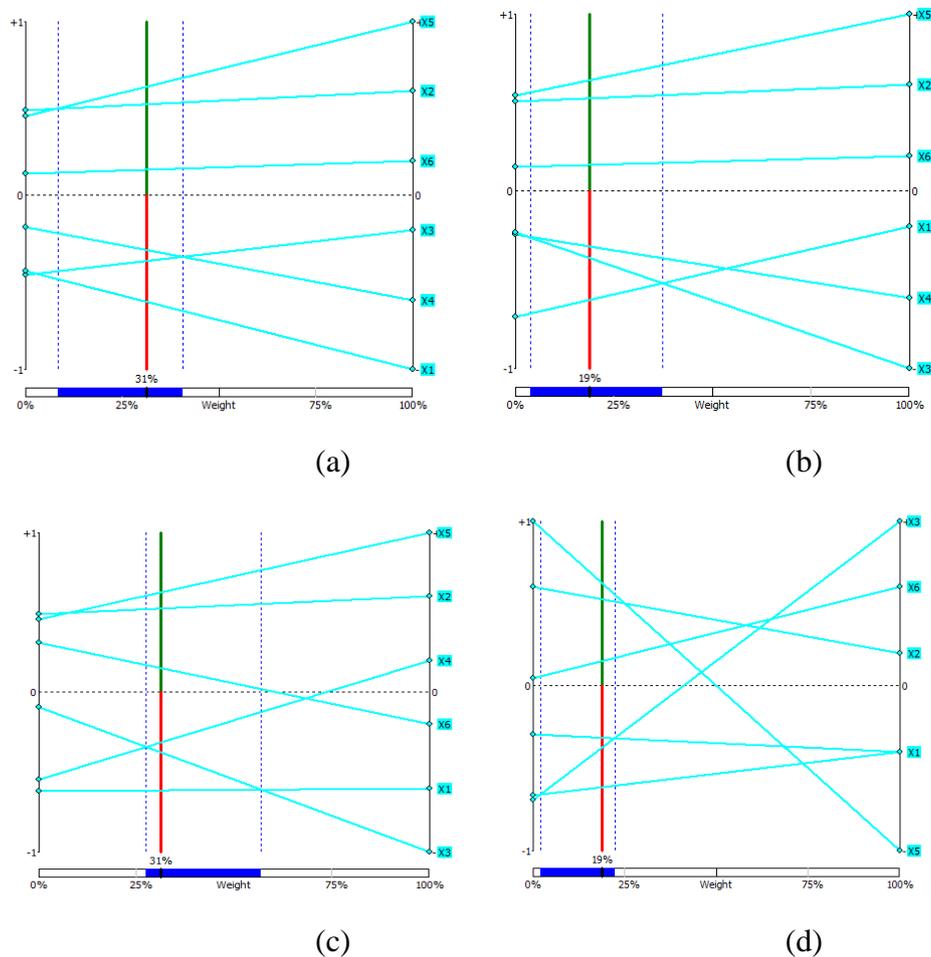


Gambar 4. Result output *GAIA Visual Analysis*

Berdasarkan gambar 4, dapat disimpulkan pada Result Output *GAIA Visual Analysis* menunjukkan bahwa quality sebesar 94,1%, memverifikasi bahwa reliabel karena memiliki nilai persentase diatas 70% dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas representasi *GAIA Visual Analysis* sangat baik sehingga dianggap mampu memberikan hasil yang andal dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sumbu keputusan sejalan dengan sub sektor pangan dan holtikultura karena tongkat keputusan yang diperoleh searah dengan memproyeksikan vektor bobot ke bidang GAIA sehingga menunjukkan arah terbaik saat ini untuk solusi kompromi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub sektor pangan dan

holtikultura merupakan kebijakan terbaik dan sub sektor peternakan adalah yang terburuk dalam analisis GAIA, hal ini karena terletak paling jauh dari sumbu berlawanan.

Analisis Sensitivitas



Gambar 5. Result Output *Visual Stability Intervals*

Berdasarkan gambar 5, dapat disimpulkan pada Result Output *Visual Stability Intervals* dari setiap kriteria subsektor pertanian yakni pangan dan holtikultura, perkebunan dan kehutanan, perikanan serta peternakan yang sensitif terhadap perubahan bobot. Semua alternatif kebijakan subsektor pertanian yang meliputi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 dan x_6 pada kriteria pangan dan holtikultura menunjukkan alternatif sensitif terhadap perubahan bobot. Dapat dilihat pada gambar 5 (a) menunjukkan sensitivitas dalam kriteria pangan dan holtikultura ketika mengalami perubahan pada bobot bahkan diatas 31% (bobot kriteria diubah dari *baseline* 31% sampai 100%), maka secara berurutan prioritas kebijakan subsektor pertanian akan berubah yakni menjadi x_5, x_2, x_6, x_3, x_4 dan x_1 .

Selanjutnya, berdasarkan semua alternatif kebijakan subsektor pertanian yang meliputi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 dan x_6 pada kriteria perkebunan dan kehutanan menunjukkan alternatif sensitif terhadap perubahan bobot. Dapat dilihat pada gambar 5 (b)

menunjukkan sensitivitas dalam kriteria perkebunan dan kehutanan ketika mengalami perubahan pada bobot diatas 19% (bobot kriteria diubah dari *baseline* 19% sampai 100%), maka secara berurutan prioritas kebijakan subsektor pertanian akan berubah yakni menjadi x_5, x_2, x_6, x_1, x_4 dan x_3 .

Kemudian, berdasarkan semua alternatif kebijakan subsektor pertanian yang meliputi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 dan x_6 pada kriteria perikanan menunjukkan alternatif sensitif terhadap perubahan bobot. Dapat dilihat pada gambar 5 (c) menunjukkan sensitivitas dalam kriteria perikanan ketika mengalami perubahan pada bobot diatas 31% (bobot kriteria diubah dari *baseline* 31% sampai 100%), maka secara berurutan prioritas kebijakan subsektor pertanian akan berubah yakni menjadi x_5, x_2, x_4, x_6, x_1 dan x_3 .

Terakhir, berdasarkan semua alternatif kebijakan subsektor pertanian yang meliputi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 dan x_6 pada kriteria peternakan menunjukkan alternatif sensitif terhadap perubahan bobot. Dapat dilihat pada gambar 5 (d) menunjukkan sensitivitas dalam kriteria peternakan ketika mengalami perubahan pada bobot diatas 19% (bobot kriteria diubah dari *baseline* 19% sampai 100%), maka secara berurutan prioritas kebijakan subsektor pertanian akan berubah yakni menjadi x_3, x_6, x_2, x_1 , dan x_5 .

Prioritas kebijakan subsektor pertanian

Berdasarkan hasil analisis seperti yang diuraikan diatas, maka diperoleh prioritas kebijakan subsektor pertanian yang dapat diimplementasikan di Kab. Malang, Jawa Timur. Prioritas kebijakan subsektor pertanian yaitu kriteria pangan dan hortikultura dengan kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*), dimana akan berpengaruh secara positif yang signifikan dan tentunya dengan pendekatan kebijakan ini akan memberikan keuntungan nyata serta lebih disukai. Upaya dan langkah-langkah strategis terus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan pada masa mendatang. Perencanaan strategis yang mempengaruhi proses pelayanan kepada masyarakat perlu terus dievaluasi secara berkesinambungan, diantaranya dengan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar kebijakan dapat terealisasi dan berjalan sesuai tupoksi yang bersifat *mandatory* dari Pemerintah Daerah Kab.Malang. Sejalan dengan (O. , Arawomo and C. , Adeoye T. 2020) pengaturan institusi negara menentukan kelayakan intervensi kebijakan memainkan peran penting dalam perekonomian, dengan demikian maka, kualitas mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Institusi yang baik mendorong pertukaran dengan mengurangi biaya transaksi dan mendorong kepercayaan, yang menginformasikan bagaimana sumber daya publik dikelola di berbagai tingkat ekonomi. Dimana kualitas kelembagaan mengalahkan geografi dan perdagangan sebagai penjelasan untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila institusi yang lemah, hilang, atau sesat berkontribusi pada keterbelakangan. Kualitas penyampaian layanan publik, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, korupsi, dan penanganan sumber daya publik yang tidak efisien adalah semua elemen yang menentukan kualitas suatu lembaga dan dapat membantu menjelaskan perbedaan efektivitas dalam implementasi kebijakan.

Menurut (Suryana 2014) modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, ketersediaan teknologi, dan pengembangan

kemitraan strategis dengan berbagai komponen pemangku kepentingan. Empat strategi yang diajukan dalam membangun ketersediaan pangan adalah sebagai berikut: (1) membangun penyediaan pangan berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional (2) memberdayakan usaha pangan skala kecil yang menjadi ciri dominan pada ekonomi pertanian Indonesia (3) mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi tepat-guna untuk peningkatan produktivitas tanaman dan efisiensi usaha (4) mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan, dan distribusi pangan. Peningkatan aksesibilitas petani secara fisik dan ekonomi terhadap teknologi pengolahan pangan tersebut mutlak diperlukan.

KESIMPULAN

Alternatif prioritas kebijakan subsektor pertanian yang dapat diimplementasikan di Kab. Malang, Jawa Timur yaitu kriteria pangan dan hortikultura dengan kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dan akses pangan masyarakat (*food acces*), dimana akan berpengaruh secara positif dan tentunya dengan pendekatan kebijakan ini akan memberikan keuntungan nyata serta lebih disukai. Pemerintah Daerah Kab.Malang terus melakukan evaluasi dan implementasi dalam upaya mewujudkan ketahanan dan revitalisasi pangan tentunya dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan dengan mengkomodasikan aspirasi masyarakat serta *stakeholder* yang kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, Tri Noor. 2014. "Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian." *Borneo Administrator* 10(2):1–20.
- Florida, Nelino, César López, and Vicente Pocomucha. 2012. "CORE View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.ac.uk." 2(2):35–43.
- Middendorf, B. Jan, Aliou Faye, Gerad Middendorf, Zachary P. Stewart, Prakash K. Jha, and P. V. Var. Prasad. 2021. "Smallholder Farmer Perceptions about the Impact of COVID-19 on Agriculture and Livelihoods in Senegal." *Agricultural Systems* 190(September 2020):103108. doi: 10.1016/j.agsy.2021.103108.
- Moeis, Faizal Rahmanto, Teguh Dartanto, Jossy Prananta Moeis, and Mohamad Ikhsan. 2020. "A Longitudinal Study of Agriculture Households in Indonesia: The Effect of Land and Labor Mobility on Welfare and Poverty Dynamics." *World Development Perspectives* 20(September):100261. doi: 10.1016/j.wdp.2020.100261.
- O. , Arawomo, and C. , Adeoye T. 2020. "Public Spending and Economic Growth : The Role of Institutional Quality." *International Journal of Accounting Research* 5(2):61–76. doi: 10.12816/0058790.
- Rangelova, Rossitsa, Katia Vladimirova, Bulgarian Academy Sciences, and World Economy. 2017. "Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal AGRICULTURAL SECTOR IN BULGARIA DURING THE TRANSITION Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal." 3(2):30–43.
- Soko, Nyembezi N., Simeon Kaitibie, and Nazmun N. Ratna. 2023. "Does Institutional Quality Affect the Impact of Public Agricultural Spending on Food Security in Sub-

- Saharan Africa and Asia?” *Global Food Security* 36:100668. doi: 10.1016/J.GFS.2022.100668.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Achmad. 2014. “MENUJU KETAHANAN PANGAN INDONESIA BERKELANJUTAN 2025 : TANTANGAN DAN PENANGANANNYA Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025 : Challenges and Its Responses.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 32(2):123–35.
- Yamin. 2019. “Kerentananketahanan Pangan Wilayah Dan Hubungannya Dengan Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Dalam Konsep ‘Wellbeing.’” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3(3):495–502. doi: 10.21776/ub.jepa.2019.003.03.5.
- Zuraidah, Eva. 2019. “Decision Support System For Selecting Bali Tourist Attractions Using The PROMETHEE Method.” *Sinkron* 3(2):1. doi: 10.33395/sinkron.v3i2.237.